

Judul : Tunggakan BPJS akan dihapus, komisi IX ingatkan sasaran harus tepat
Tanggal : Rabu, 25 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Tunggakan BPJS Akan Dihapus Komisi IX Ingatkan Sasaran Harus Tepat



Ranny Fahd Arafiq

KOMISI IX DPR menyambut baik rencana Pemerintah yang akan menghapus tunggakan iuran dan denda BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri kelas 3. Langkah tersebut dinilai cukup membantu bagi kelompok yang selama ini kesulitan membayar iuran secara rutin. Warga tak mampu bakal bisa bahagia

Anggota Komisi IX DPR Ranny Fahd Arafiq menilai masyarakat yang sempat nonaktif tetap bisa kembali mendapatkan perlindungan kesehatan tanpa terbebani tunggakan masa lalu. Sebab selama ini banyak sekali masyarakat yang pada akhirnya terhenti kepesertaannya bukan karena tidak ingin membayar, tetapi karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan.

"Dalam situasi seperti itu, keberadaan kebijakan yang lebih fleksibel menjadi penting agar akses layanan kesehatan tetap terbuka bagi mereka yang membutuhkan," ujar Ranny dalam keterangannya, Selasa (24/3/2026).

Diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, Pemerintah tengah memfinalisasi rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang penghapusan tunggakan iuran dan denda BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri kelas 3. Tujuannya, meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong kepesertaan aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Utamanya, bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang selama ini menunggak iuran.

"Tunggakan iuran kerap menjadi hambatan peserta untuk kembali aktif menggunakan layanan BPJS Kesehatan," kata Purbaya dalam Rapat Dengar Pendapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin

(9/2/2026). Akibatnya, banyak warga kehilangan akses perlindungan kesehatan karena terbebani utang yang menumpuk.

Ranny mendorong pelaksanaan kebijakan ini agar dilakukan secara tepat sasaran. Caranya dengan memastikan penghapusan tunggakan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang memang tidak mampu. Dengan sistem pendataan yang baik dan terintegrasi, program ini diharapkan dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan ketimpangan di lapangan.

Selain itu, Ranny menilai langkah ini bukan cuma akan berdampak pada masyarakat, tetapi juga berpotensi memperbaiki keberlanjutan program jaminan kesehatan secara keseluruhan. Karena dengan semakin banyaknya peserta yang kembali aktif, maka cakupan perlindungan kesehatan bisa meningkat dan sistem menjadi lebih inklusif.

Ranny berharap, kebijakan penghapusan tunggakan ini dapat diikuti dengan sosialisasi masif kepada masyarakat. Harapannya informasi tersebut dapat tersampaikan dengan jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

"Kami mengajak masyarakat untuk tetap berkomitmen menjaga kepesertaan aktif ke depan, agar manfaat jaminan kesehatan dapat dirasakan secara berkelanjutan," tegas politikus Golkar ini.

Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetyani Aher menambahkan, kebijakan penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan harus dilaksanakan secara humanis, otomatis, dan tidak membebani rakyat miskin. Sebab kebijakan yang bakal dituangkan dalam bentuk peraturan presiden (Perpres) itu tidak boleh dipandang sebagai persoalan administrasi atau potensi moral hazard semata. "Tapi, lebih pada tanggung jawab negara dalam menjamin hak dasar atas kesehatan," kata Netty dalam keterangannya, Selasa (24/3/2026).

Netty bilang, banyak peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang sedianya mampu membayar iuran bulanan, tapi tersandera oleh akumulasi tunggakan. Akibatnya mereka takut berobat karena kartu mati. "Ini bukan sekadar soal data, ini soal nyawa," tandasnya. ■ TIF